

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Ubadillah dkk, 2006, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Bagir Manan, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers.

Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional. Regional. dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Hotma P Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group.

Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rony Saputra dkk, 2013, *Ketika Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, dan Berekspresi Diadili*, YLBHI-LBH Padang.

R. Herlambang Perdana Wiratman, dkk, 2016, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta: UII Press.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Saidurrahman dan Arifiansyah, 2018, *Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati*, Jakarta: Kencana.

Syofiardi Bachyul JB, Roni Saputra dan Andika D. Khagen, 2013, *Memahami Hukum Pers*, LBH Pers Padang Yayasan TIFA.

Yalvema Miaz, 2012, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, Padang: UNP Press.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim tentang Terdakwa Haris Azhar.

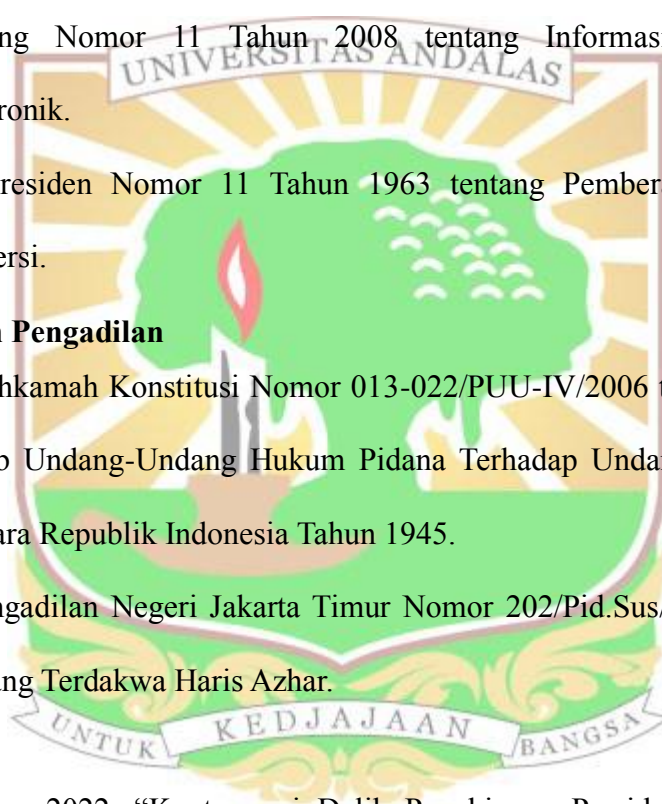
D. Jurnal

Ajie Ramdan, 2022, “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP”, Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 2.

Azmi, 2018, “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan”, Jurnal Alqalam, Vol. 35 No. 1.

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2021, “Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi”, Jurnal Yustitia, Vol. 15, No. 1.

Della Luysky dan Cairin Melina, 2018, “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, Lex Scientia Review, Vol. 2, No. 2.



- Eri Ramdani, Viky Martian, dan Woro Wuryani, 2018, “Analisis Makna Yang Terkandung Dalam Puisi Karya Wiji Thukul Yang Berjudul Peringatan”, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 1 No. 5.
- Fairus Augustina Rachmawati dan Januari Nasya, 2021, “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7 No. 2.
- Faridatus Sholeha, dkk, 2023, “Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara (Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, *Welfare State*, Vol. 2, No. 2.
- Fridina Tiara Khanza dan Madaniyah Anugrah Murti, 2022, “Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP”, *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Khairul Fahmi, 2010, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2.
- Kristian Megahputra Warong, dkk, 2020, “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial”, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 5.
- Mohamad Faisal Ridho, 2017, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 8.
- Mudzakkir, 2004, “Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Kajian Pustaka No. 37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel, *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, No. 3.
- Muhammad Jazuli, 2021, “Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 1.
- Nur Rahmawati, dkk, 2021, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3, No.1.

- Nur Rohin Yunus, 2015, “Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, Vol. 2 No. 2.
- Ruth Madeleine Rubba, 2020, “Kedaulatan Rakyat Tahun 1974-1994”, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No. 1.
- Setyo Nugroho, 2013, “Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan”, *Journal.uinjkt.ac.id*, Vol. 1, No. 2.
- Tony Yuri, 2016, “Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1.
- Waisol Qoroni dan Indien Winarwati, 2021, “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 2, No. 1.
- Zico Junius F, 2022, “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Rechtvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 11, No. 1.
- Zamroni Abdussamad, 2010, “Kebijakan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional (Studi kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Politik dalam reformasi hukum dewasa ini)”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 7, No. 3.

E. Website

- Accessnow, 2023, *Tunisia: President Must Scrap Decree-Law Undermining Free Expression and the Press*, <https://www.accessnow.org/press-release/decreed-law-54-tunisia/>
- Ady Thea DA, 2023, Lima Poin Amicus Curiae Komnas HAM dalam Perkara Haris-Fatia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-poin-amicus-curiae-komnas-ham-dalam-perkara-haris-fatia-lt6565cace0b3d9/?page=all>
- Andry Novelino, 2022, Survei: Unjuk Rasa Semakin Sulit, Aparat Semena-mena Tangkap Demo, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220711172021-12-820096/survei-unjuk-rasa-semakin-sulit-aparat-semena-mena-tangkap-pedemo>
- Egi Adyatama dan Eko Ari, 2021, Kebebasan Berpendapat Masih Dibatasi, KontraS Nilai Jokowi Masih Anti Kritikan,

<https://nasional.tempo.co/read/1505988/kebebasan-berpendapat-masih-dibatasi-kontras-nilai-jokowi-masih-alergi-kritikan>

Henrico Pajruh Falah, Pro Kontra Pasal Penghinaan Kepada Presiden Dalam KUHP Baru, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, <https://baladena.id/pro-kontra-pasal-penghinaan-kepada-presiden-dalam-kuhp-baru/>

Human Rights Guide, Human rights restrictions, <https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/human-rights-restrictions>

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online*, diakses dari <https://kbbi.web.id/batas>

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online*, diakses dari <https://kbbi.web.id/hak>

Reza Adetya Tama, Kritik: Destruktif VS Konstruktif, <https://psychepediaconsulting.medium.com/kritik-destruktif-vs-konstruktif-931d9830743a>

Rosi, 2023, Fakta Sajak Kontroversial Peringatan Karya Maestro Wiji Thukul, diakses dari <https://kabarbaru.co/fakta-sajak-kontroversial-peringatan-karya-maestro-wiji-thukul/>

Safenet, 2023, Revisi UU ITE Harus Terbuka, <https://safenet.or.id/id/2023/07/revisi-uu-ite-harus-terbuka-serius-menjawab-permasalahan-dan-tidak-boleh-terburu-buru/>

Safenet, Lagi: Salah Kaprah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, <https://safenet.or.id/id/2014/03/lagi-salah-kaprah-pasal-27-ayat-3-uu-ite/>

Sutoyo, 2016, Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, http://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Konsep-Kedaulatan-Rakyat-dalam-Undang-Undang-Dasar-Negara-Republik-Indonesia-Tahun-1945-Oleh-Dr.-Sutoyo-S.H.-M.Hum_.pdf

Tempo, 2023, Polisi Diduga Intimidasi Pentas Teater Butet Kartaredjasa dan Agus Noor di Taman Ismail Marzuki, <https://nasional.tempo.co/read/1805290/polisi-diduga-intimidasi-pentas-teater-butet-kartaredjasa-dan-agus-noor-di-taman-ismail-marzuki>

- Thailand Court Sentences Activist to 50 years in Prison for Insulting Monarchy on Facebook*, 2024, <https://www.abc.net.au/news/2024-01-20/court-of-appeals-thailand-hands-activist-50-year-prison-sentence/103371438>
- Thobib Al-Asyhar, 2020, *Tunisia Gaya Hidup dan Demokrasi*, <https://mirror.mui.or.id/pojok-mui/28182/tunisia-gaya-hidup-dan-demokrasi/>
- Tim BBC, Hariz Azhar Dan Fatia Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Lihut ‘Siap Minta Maaf Asalkan Luhut Memaparkan Data Tandingan Hasil Riset’, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60824315>
- Tim BBC News, 2016, *Lese Majeste ‘Pasal Pelindung’ Keluarga Kerajaan Thailand*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161012_dunia_thailand_lese_majeste_explainer
- Tim detik, 2024, *Meninjau UU ITE Setelah Dua Kali Revisi*, <https://news.detik.com/kolom/d-7349712/meninjau-uu-ite-setelah-dua-kali-revisi>
- Tim Detik Sumut, 2024, *Akhir Kasus Mahasiswa Unri Dipolisikan Rektor gegara Kritik Biaya Kuliah Mahal*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7338489/akhir-kasus-mahasiswa-unri-dipolisikan-rektor-gegara-kritik-biaya-kuliah-mahal>
- Tim Kompas, 2022, *Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 dan Tuntutan Mahasiswa yang terabaikan*, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/15/151630382/peristiwa-malari-pada-15-januari-1974-dan-tuntutan-mahasiswa-yang?page=all#page2>
- Tim Tempo, 2018, *Lese Majeste Pasal Penghinaan Kepala Negara Versi Thailand*, <https://hukum.tempo.co/read/1057016/lese-majeste-pasal-penghinaan-kepala-negara-versi-thailand>
- Vika Azkiya, 2022, *Jawaban Responden Terkait Masyarakat Semakin Takut Menyatakan Pendapat Berdasarkan Survei Indikator Politik (Maret 2022)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/05/survei-indikator-ungkap-masyarakat-semakin-takut-menyampaikan-pendapat>